BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang, sehingga pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan salah satu hal yang sangat penting. Untuk meningkatkan persaingan Indonesia di mata dunia, saat ini pemerintah melakukan kerjasama dengan badan usaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Infrastruktur terdiri dari jembatan, jalan, rel kereta api, terminal bus, pelabuhan udara, pelabuhan laut, ketersediaan air bersih, dam, irigasi, telekomunikasi, hingga buangan air kotor, buangan sampah, buangan limbah industri dan lain-lain. Infrastruktur sangat berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi dan sosial, oleh karena itu jika terjadi kegagalan suatu infrastruktur akan mempengaruhi dan memberi dampak kepada masyarakat.

Berdasarkan *The Global Competitiveness Report 2015 -2016* ketersediaan infrastruktur di Indonesia tahun 2015 menduduki rangking ke-62 dari 140 negara yang disurvei, naik 10 peringkat dari tahun sebelumnya. *Competitiveness Report* adalah laporan tahunan dari Forum Ekonomi Dunia yang setiap tahun mengukur daya saing suatu Negara menggunakan *Global Competitiveness Index*, salah satu yang ditinjau adalah infrastruktur.

Ketersediaan infrastruktur di Indonesia dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara sedikit lebih baik dibandingkan Philipina (rangking 90) dan Vietnam (rangking 76), namun jauh tertinggal dibandingkan dengan Singapura

(rangking 2), Malaysia (rangking 24) dan Thailand (rangking 44). Ketersediaan infrastruktur di Indonesia secara umum di tahun 2015 mempunyai skor 4,2 dari skor maksimal 7. Komponen pilar infrastruktur yang dinilai meliputi delapan item, infrastruktur di Indonesia kualitas jalan (rangking 80), kualitas jalan kereta api (rangking 43), kualitas pelabuhan (rangking 82), kualitas pelabuhan udara (rangking 66), ketersediaan *airline seat* (rangking 15), ketersediaan listrik (rangking 86), telepon seluler (rangking 49), dan sambungan telepon (rangking 80).

“ Menurut Anggota Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana, dilansir oleh Diah Anggraeni Retnaningrum, Jumat 13 Maret 2015 dari Jakarta, SatuHarapan.com, Majunya perkembangan infrastruktur di Indonesia, dapat dilihat dari rel kereta api sepanjang 5.042 kilometer yang merupakan rel terpanjang di negara-negara ASEAN, dan jumlah bandara terbanyak yaitu 676, mengalahkan Tiongkok yang memiliki 497 bandara atau India yang mempunyai 352 bandara”. Hal ini terlihat dengan jelas keseriusan pemerintah dalam melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur.

American Society of Civil Engineers (ASCE) adalah badan profesional yang didirikan pada tahun 1852 berbasis di Reston, Virginia, untuk mewakili anggota profesi teknik sipil di seluruh dunia. ASCE mempunyai beberapa misi antara lain memajukan teknik sipil, melayani kepentingan publik, dan mengembangkan serta mendukung pemimpin insinyur sipil.

Penilaian kondisi infrastruktur merupakan suatu program ASCE untuk memberi data dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di negaranya. Diharapkan analisis infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan aspek penilaian ASCE ini dapat membantu pemerintah dalam mengetahui kondisi dan potensi infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan membantu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD, sehingga dana yang akan dialokasikan tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Provinsi Kepulauan yang terdiri dari dua pulau utama yaitu, Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Ibukota Provinsi dari pulau ini yaitu Pangkal Pinang. Perhubungan laut merupakan transportasi yang strategis bagi Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang merupakan wilayah kepulauan. Di Kepulauan Bangka Belitung terdapat 9 pelabuhan dan kunjungan kapal di Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh kapal milik pelayaran dalam negeri. Di Provinsi Bangka Belitung, terdapat 2 pelabuhan udara yaitu Bandar Udara Depati Amir di Pulau Bangka dan Bandar Udara HAS Hanandjoeddin di Pulau Belitung. Bandar Udara ini melayani penerbangan domestik dan internasional tapi bukan merupakan bandara internasional. Mengingat Kepulauan Bangka Belitung sebagai destinasi wisata baru, bandara di sana terus membenahi infrastruktur dan pelayanannya. Maskapai yang beroperasi di Bandar Udara Depati Amir dan di Bandar Udara HAS Hanandjoeddin, yaitu Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air, Citilink, dan Sky Aviation.

Di sebelah utara Kepulauan Bangka Belitung terdapat Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjung Pinang, terbentuk pada tanggal 25 Oktober 2002 dan merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia dengan luas wilayah sebesar 252.601 km². Provinsi yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Riau ini menjadi provinsi yang ke-32 di Indonesia. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau sebanyak 95% wilayahnya terdiri dari lautan dan hanya sekitar 5% daratan. Sebagai Provinsi Kepulauan di Indonesia, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau terus meningkatkan pembangunan infrastruktur di masing-masing provinsi.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mengetahui kondisi infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dan sosial berdasarkan penilaian para praktisi teknik sipil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Tujuan

Tujuan dari tugas akhir ini yaitu :

1. Menilai sampai sejauh mana kelayakan dan kondisi infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut para insinyur teknik sipil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan menggunakan bantuan aspek penilaian ASCE.
2. Membandingkan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini diberikan beberapa batasan agar penelitian lebih terfokus sehingga hasil penelitian dapat lebih maksimal. Batasan tersebut meliputi:

1. Infrastruktur yang akan dimasukkan dalam laporan ini meliputi : pelabuhan udara, pelabuhan laut, terminal, jembatan dan jalan, stasiun kereta api, kereta api, dam dan irigasi, air minum, buangan air kotor, buangan sampah, fasilitas pariwisata, buangan limbah industri, sekolah dan universitas, telekomunikasi, listrik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pengumpulan data primer dengan melakukan penyebaran kuesioner
3. Responden penelitian ini adalah para insinyur yang bekerja di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (meliputi Kontraktor, Konsultan, Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Non Dinas Pekerjaan Umum).

1.5 Manfaat

Manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana yang dapat digunakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengontrol dan mengembangkan infrastrukturnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Sebagai tolok ukur yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menyusun APBD.